

**KINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA (BPSTKI) KOTA PADANG DALAM  
RANGKA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR  
NEGERI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik*



**ILHAM MAULANA**

**NIM 2012/1201616**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2017**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) KOTA  
PADANG DALAM RANGKA MELINDUNGI TENAGA KERJA  
INDONESIA KE LUAR NEGERI**

Nama : Ilham Maulana  
TM/NIM : 2012/1201616  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2017

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Attri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 19700212 199802 1 001

**Pembimbing II**



**Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.d**  
NIP. 19570416 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas  
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

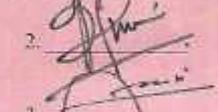
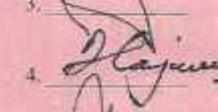
Pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 10,00 s/d 12,00 WIB

**Judul** : **Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)  
Kota Padang Dalam Rangka Melindungi Tenaga  
Kerja Indonesia Ke Luar Negeri**

Nama : Ilham Maulana  
TM/NIM : 2012/1201616  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2017

**Tim Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Prof. Dasman Lamin, M.Pd, Ph.D	2. 
Anggota	: Dra. Jumiaty, M.Si	3. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	4. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	5. 

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 196210011989031002



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana  
NIM / TM : 1201616 / 2012  
Tempat / Tanggal lahir : Marihat Ulu, 20 Agustus 1994  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Februari 2017

Yang Membuat Pernyataan

  
ILHAM MAULANA  
1201616 / 2012

## ABSTRAK

**ILHAM MAULANA 2012/1201616 : Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri**

Adapun penelitian ini beranjak dari permasalahan TKI yang bekerja di luar Negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri dan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Uji Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang dibuat dari tiga indikator yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas dapat dikatakan baik. Indikator produktivitas ditunjukkan dengan banyaknya TKI bermasalah yang berhasil diselesaikan masalahnya oleh pihak BP3TKI. Indikator responsivitas ditunjukkan dengan sikap terbuka dari BP3TKI dalam menerima segala masukan maupun keluhan dari TKI. Indikator akuntabilitas dilihat dengan adanya laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang kepada BNP2TKI serta tanggung jawab pegawai dalam memberikan perlindungan pada TKI sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

**Kata Kunci : kinerja pelayanan public, perlindungan TKI, Tenaga Kerja Indonesia**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda Suyono dan Ibunda Sulastina tercinta, kakak ku Nurin Minanti dan adik kecilku Zahra Aulya tersayang, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada teman-teman Ilmu Administrasi Negara UNP angkatan 2012, para senior dan junior juga tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Dan kepada Fultri yang selalu mendampingi penulis baik senang maupun susah selama kuliah beserta sahabat-sahabat terdekat saya, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni ibu Dra. Jumiati, M.Si, Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Bapak Dr. Dasril, M.Ag terima kasih telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
6. Fultri Sri Ratu Handayani yang selalu mendampingi dan memberi penulis semangat selama kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Padang, 11 Januari 2017

Penulis

**Ilham Maulana**

**1201616**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori.....	9
1. Konsep Kinerja Pelayanan Publik.....	9
2. Penilaian dan Indikator Kinerja.....	13
3. Konsep Perlindungan TKI.....	26
4. Konsep Tenaga Kerja Indonesia.....	30
B. Kerangka konseptual.....	38

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	42
E. Uji Keabsahan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46

### **BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	48
B. Temuan Khusus.....	56
C. Pembahasan.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Data Penempatan TKI Ke Luar Negeri Di BP3TKI Padang Tahun 201.....	4
Tabel 2	Daftar Informan Penelitian.....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 2 Struktur Organisasi BP3TKI Padang.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Tugas Dosen Pembimbing
Lampiran 4	Dokumentasi Peneliti

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan bangsa dan negara merupakan salah satu tujuan utama Negara Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan “mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa pasal di UUD NKRI 1945, salah satunya adalah Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak

yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Menurut data statistik BNP2TKI pada tahun 2015 terdapat 275.736 TKI yang dilayani dengan jumlah TKI formal 152.394 dan TKI informal 123.342. Melihat begitu banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri namun banyak juga TKI yang

bermasalah dalam bekerja di luar negeri. Menurut supriyatin (20) mantan TKI yang dikutip melalui harian kompas tanggal 5 April 2016 meminta agar pemerintah serius membantu TKI yang bermasalah di luar negeri ia mengatakan bahwa :

“...saat ini masih banyak tenaga kerja asal indonesia yang terjebak di irak dan kesulitan pulang ke Indonesia bahkan banyak TKI yang bekerja di luar negeri tujuh bulan tidak di gaji, tidak punya uang dan paspor mereka habis. Mereka tidak tahu harus mengadu keamana”.

Dengan melihat fakta bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah masih rendah maka diperlukan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja organisasi publik dalam memberikan perlindungan sangat diperlukan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada TKI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut, ditempatkan kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal.

Menurut servulus dalam kuliah umum tentang Implementasi Kebijakan Negara dalam Perlindungan TKI di Luar Negeri pada tanggal 23 Maret 2016 permasalahan umum yang terjadi kepada TKI 80% terjadi di dalam negeri sedangkan di luar negeri hanya 20%. Salah satu aspek permasalahan yang terjadi kepada TKI di dalam negeri menurut servulus yaitu aspek oknum aparat yang memberikan pengawasan yang lemah, inskonsistensi atas komitmen, simbiosis mutualisme, *no free lunch* dan tanggung jawab moral yang kurang.

Lalu Husni ( 2005 : 93 ) berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sebagai landasan Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Peranan dari Pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas TKI serta dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dalam penempatan TKI ke luar negeri.

Di Sumatra Barat, menjadi TKI di luar negeri adalah salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat upah yang memadai, antusias masyarakat Sumatra Barat menjadi TKI terlihat dalam :

**Tabel 1.1**  
Data Penempatan TKI Keluar Negeri Di BP3TKI Padang  
Tahun 2011-2015

Tahun	LK	PR	Formal	Informal	Jumlah
2011	95	516	610	1	611
2012	181	1148	1289	40	1329
2013	209	1015	1176	48	1224
2014	89	699	754	34	788
2015	20	549	558	11	569
Total	594	3927	4387	134	4521

Sumber : BP3TKI Padang Tahun 2015

Dari data tersebut terlihat dari tahun 2011-2015 bahwa tidak sedikit masyarakat yang menjadi TKI di luar negeri, pada tahun 2015 terdapat 569 TKI yang bekerja di luar negeri. Adanya antusias masyarakat untuk bekerja di luar negeri mengharuskan pemerintah lebih memperhatikan Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di luar negeri.

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada TKI serta melindungi harkat dan martabat Tenaga Kerja Indonesia maka pengaturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang no 39 tahun 2004. Pemerintah membentuk Balai Peleayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai tersebut diatur dengan Peraturan Presiden no 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang bermaksud melakukan perlindungan semaksimal mungkin mulai pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Hal ini di pertegas oleh ibu Valrie yang peneliti wawancarai pada 21 maret 2016, mengungkapkan:

“...BP3TKI Padang memberikan pemberdayaan dan pengembangan pelatihan, pembekalan para calon TKI yang kan berangkat ke luar negeri dan juga memberikan pelayanan perlindungan mulai dari pemberangkatan, semasa kerja dan kepulangan kenegara Indonesia lagi”.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa BP3TKI memberikan perlindungan pada TKI mulai dari pemberangkatan, semasa kerja dan kepulangan kenegara indonesia. Namun permasalahan yang dialami saat ini banyak CTKI yang gagal berangkat dikarenakan gagal medis di negara penempatan, kabur ketika memiliki masa kontrak pada negara penempatan dan di paksa bekerja ketika kontrak kerja mereka habis. Bahkan meraka tidak mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan. Hal ini sama dengan pendapat ibu melly (42 tahun) TKI yang sudah kembali ke Indonsia yang peneliti wawancarai 3 Mei 2016 :

“...saya hanya tau peraturan dari perusahaan yang membawa saya, semua sudah dipersiapkan oleh perusahaan dan saya hanya mengikuti aturan yang diberikan oleh perusahaan, asal saya mengetahui aturan yang ada. Saya akan aman, jangan sampai diwaktu saya bekerja melakukan kesalahan”.

Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terjadi pada fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Namun sebagian besar TKI yang bermasalah disebabkan karena rendahnya tingkat keterampilan dan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Sering kali TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlakuan kasar, bahkan sampai meninggal dunia. Untuk itu diperlukan perlindungan TKI yang merupakan devisa negara.

Berdasarkan wawancara dan penjelasan tersebut terlihat masih banyak TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan perlindungan dari pemerintah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana kinerja BP3TKI dalam rangka melindungi TKI yang bekerja ke luar negeri dengan judul: *Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.*

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih banyaknya penyiksaan dan pelanggaran HAM terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri
2. Kurangnya pengetahuan TKI tentang perlindungan TKI
3. Lemahnya pengawasan pemerintah
4. Rendahnya kualitas TKI dan kurangnya kemampuan TKI

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan Mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada *Kinerja Balai Pelayanan*

*Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang  
Dalam Rangka Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri.*

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang dalam Rangka melindungi TKI Ke Luar Negeri ?
2. Bagaimana Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang dalam Rangka Melindungi TKI Ke Luar Negeri?

#### **E. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui perlindungan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang dalam Rangka Melindungi TKI Ke Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Padang dalam Rangka Melindungi TKI Ke Luar Negeri.

#### **F. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dan konsep ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Administrasi Negara seperti, mata kuliah Prilaku Organisasi, Teori Organisasi, Pengembangan Organisasi, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara Dan Pemberdayaan Masyarakat.

## 2. Manfaat Praktik

### a. Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang dalam melakukan kegiatan perlindungan terhadap TKI bermasalah.

### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dengan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum ketenagakerjaan untuk bekerja di luar negeri dengan rasa aman sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran di Kota Padang.

### c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.